

**PERSPEKTIF RUMAHTANGGA PETANI DAN PERUSAHAAN AGRIBISNIS
TERHADAP CONTRACT FARMING
(Sebuah Tinjauan Literatur)
*Farm Household and Agribusiness Companies Perspective's
about Contract Farming (A Literature Review)***

Rostiar Sitorus

*Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung
Mahasiswa program Doktorat Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana IPB
e-mail: oty.torus72@gmail.com*

ABSTRACT

This paper aims to explain the difference perspective of farmers and agribusiness companies about the contract farming partnership scheme. An illustration of the phenomenon that occurs in the countryside that there are many farmers who do not know about Contract Farming and the benefit. Farmers always have an orientation to obtain certainty from their farming (price, market, profit) so that Contract Farming must be able to answer this problem with facts data that support positive benefits from the existence of Contract Farming. On the other hand that the positive benefits should be enjoyed by the agribusiness company as a business partner so that sustainable partnership can be realized. So it is important to discuss how the perspective of this partnership for farm household and agribusiness companies. A review of literature and scientific articles is presented to discuss case examples in rural areas. The results suggest: 1) Farmers consider several things: market certainty, capital, employment, risk management, technology and information, 2) Agribusiness companies consider rights and obligations in partnership with farmers, 3) vertical consolidation is sufficiently ideal for farmers and agribusiness companies.

Keywords : *Contract Farming, Farm Household, Agribusiness Company*

PENDAHULUAN

Contract Farming, secara umum merupakan penetapan aturan yang mengikat antara dua pihak yang terdiri dari perusahaan pertanian (Contractor) dengan petani secara perorangan (Catello dan Costales, 2011). Rancangan institusi yang mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas akses pasar, bersama dalam memasarkan input dan output secara kolektif, yang didukung oleh pemerintah dan swasta (Jabbar et al., 2007).

Sistem pertanian kontrak (*Contract Farming*) merupakan satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani, peternak dan nelayan dengan cara mengkaitkannya secara langsung atau pun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat. Melalui kontrak, petani, peternak dan nelayan kecil dapat beralih dari usaha tradisional/subsisten ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan penghasilan petani, peternak dan nelayan kecil yang ikut dalam

kontrak tetapi juga mempunyai efek berlipat ganda (*multiplier effects*) bagi perekonomian di pedesaan maupun perekonomian dalam skala yang lebih luas. (Daryanto, 2007).

Mengingat sampai saat ini kondisi pertanian Indonesia tetap didominasi oleh pertanian rakyat, untuk dapat berdampingan dengan perusahaan besar petani perlu dibina terutama dalam penguasaan teknologi dan akses terhadap sumber permodalan, sehingga dapat hidup berdampingan melalui pemilikan saham secara bersama. Dalam kondisi demikian kesenjangan sosial dapat diperkecil, ini berarti masing-masing subsistem agribisnis dapat berkembang saling menguntungkan dan saling membutuhkan secara adil, jauh dari eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Sebagian pelaku agribisnis adalah petani di pedesaan dan hampir semuanya merupakan kegiatan usaha tani yang dikelola dengan pola usaha keluarga. Kemitraan usaha yang menonjol di tingkat desa adalah kemitraan horizontal, antara lain berupa kerja sama kelompok tani, sedangkan

hubungan buruh-majikan, atau berupa bapak-anak angkat.

Pola keorganisasian kemitraan yang ada dewasa ini, yaitu program pemerintah (inti-plasma), tradisional (*patront client*) dan pasar masih menempatkan petani pada posisi yang tereksplorasi secara sangat tidak adil. Pola pemerintah menunjukkan terlalu dominannya intervensi pemerintah dan pada umumnya menempatkan plasma pada posisi yang lemah. Pola tradisional sulit menumbuhkan semangat dan kreativitas serta mengembangkan diri, sedangkan pola pasar menyebabkan besarnya ketergantungan petani terhadap usahawan dan dapat menimbulkan konglomerasi. Bagi pengembangan agribisnis "kecil" masalah yang sering dihadapi terutama adalah ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) dan adanya intransparansi bisnis. Oleh sebab itu peran pemerintah selain sebagai regulator dan pemberi insentif, juga perlu diarahkan untuk membantu pengembangan kegiatan kemitraan usaha agribisnis kecil.

Dengan demikian, maka pola kemitraan haruslah didasarkan pada kesadaran semua pihak bahwa mereka saling membutuhkan dan hanya dapat tumbuh bersama sehingga harus bermitra dengan prinsip transparan, adil, patuh aturan kesepakatan dan terpercaya. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu untuk melihat perbedaan perspektif terhadap *Contract Farming* dari sisi petani maupun perusahaan agribisnis sehingga tercipta kerjasama berkelanjutan yang cukup ideal.

SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Menurut Eaton dan Shepherd (2001) dalam bukunya *Contract Farming: Partnership for Growth*, *Contract Farming* dapat dibagi menjadi lima model.

1. *Centralized model*, yaitu model yang terkoordinasi secara vertikal, dimana sponsor membeli produk dari para petani dan kemudian memprosesnya atau mengemasnya dan memasarkan produknya.
2. *Nucleus estate model*, yaitu variasi dari model terpusat, dimana dalam model ini sponsor dari proyek juga memiliki dan mengatur tanah perkebunan yang biasanya dekat dengan pabrik pengolahan.

3. *Multipartite model*, yaitu biasanya melibatkan badan hukum dan perusahaan swasta yang secara bersama berpartisipasi bersama para petani.
4. *Informal model*, yaitu model yang biasanya diaplikasikan terhadap wiraswasta perseorangan atau perusahaan kecil yang biasanya membuat kontrak produksi informal yang mudah dengan para petani berdasarkan musiman.
5. *Intermediary model*, yaitu model yang biasanya diaplikasikan terhadap usaha pemberdayaan masyarakat petani melalui mediasi lembaga pemerintah atau lembaga non profit lainnya dalam mediasi dengan perusahaan mitra, fasilitasi dalam penyediaan dana, serta bimbingan dan penyuluhan.

Keberadaan Contract Farming di Indonesia

Dalam SK Mentan No. 940/Kpts/OT. 210/10/1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian dikemukakan pola-pola kemitraan usaha antara lain: inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, dan kerjasama operasional agribisnis (KOA).

Terdapat banyak jenis kontrak / kemitraan umum digunakan petani dan agribisnis di Indonesia, terlihat pada Tabel 1. Karakteristik kemitraan tersebut tergantung pada beberapa hal yaitu, lembaga yang tersedia untuk mendukung produksi dan produk pasar, komoditas yang diproduksi, basis sumber daya dari produsen dan kapasitas perusahaan agribisnis. Secara umum di Indonesia terdapat lima jenis kemitraan: plasma inti, sub-kontrak, dagang umum, agen, dan kerja sama operasional (KSO).

- Tipe kemitraan inti plasma yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra bertindak sebagai plasma inti. Perusahaan mitra membina kelompok mitra dalam hal a) penyediaan dan penyiapan lahan (kandang), b) pemberian saprodi (saprodi), c) pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, d) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi, e) pembiayaan, dan f) bantuan lain seperti efisiensi dan produktifitas usaha.

Tabel 1. Contract Farming di beberapa daerah Indonesia

No.	Daerah / Kegiatan / Komoditi
1 Bali	Sejak tahun 1993 di Desa Bona Kabupaten Gianyar Bali, <i>Contract Farming</i> bersifat informal, Komoditi : Rockmelon / Belewa, Untuk disupply ke hotel, restaurant lokal dan ke Jakarta
	Sejak tahun 2000 di Kabupaten Jembrana Bali, <i>Contract Farming</i> bersifat formal antara ketua Subak Palamerta dengan manajer PT Sang Hyang Sri, Komoditi : benih jagung varitas Bisma, Untuk disupply ke PT Sang Hyang Sri
	Tahun 1994-1998 di Kabupaten Bangli Bali, <i>Contract Farming</i> bersifat formal antara anak perusahaan PT Indohorti Jahe Pratama dengan 145 petani kecil, Komoditi : Jahe muda, untuk ekspor ke Jepang
	Tahun 1994 di Subak Pangyangan Kabupaten Jembrana, <i>Contract Farming</i> bersifat formal dengan terbentuknya UD.Cempaka Tani terdiri dari 68 petani kecil, komoditi hortikultura (semangka, timun, belewa, kacang), untuk pasar lokal dan area wisata
	Tahun 2000 di Kabupaten Tabanan, <i>Contract Farming</i> bersifat formal dengan terbentuknya Sub Terminal Agribisnis beranggotakan lebih dari 100 petani, komoditi : hortikultura (selada, daun bawang, kentang, kembang kol, kubis Cina, wortel dan paprika (cabai), untuk pasar lokal dan luar daerah
	Tahun 1997, <i>Contract Farming</i> bersifat formal antara PT Pertani dengan 13 kelompok Subak, Komoditi : benih padi
	Tahun 1992 di Kabupaten Bangli, Badung dan Tabanan, <i>Contract Farming</i> bersifat formal antara PT Nusantara Unggas Jaya dengan terbentuknya Sub Terminal Agribisnis beranggotakan lebih dari 300 petani, Komoditi : ayam broiler, Untuk pasar lokal dan luar daerah
2. Nusa Tenggara Barat	Tahun 1987 di Lombok, <i>Contract Farming</i> bersifat formal antara PT Djarum dengan 500 petani tembakau, Komoditi : tembakau, untuk kebutuhan pabrik
	Tahun 1985 di Lombok Timur, <i>Contract Farming</i> formal antara PT Pertani dengan 1900 petani, komoditi : benih padi
	Tahun 1989 – 1991, <i>Contract Farming</i> formal antara PT Phoenix Mas Persada dengan petani, komoditi : Mete dan rumput laut, untuk kebutuhan pabrik Cakranegara
	Sumber : Patrick, I. 2004
3. Sumatera Utara	Tahun 1996 di Desa Guru Singa Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, <i>Contract Farming</i> bersifat formal antara PT Putra Agro Sejati dengan petani sayur di sekitar perusahaan juga dari Kabupaten sekitar yaitu Desa Guru Singa, Kuta Gadung, Lingga Julu dan Desa Ujung Aji, komoditi : pengolahan sayur, untuk kebutuhan pabrik
	Tahun 2005 di Kecamatan Silimakuta dan di Desa Purba Kecamatan Pematang Purba Kabupaten Simalungun, <i>Contract Farming</i> formal antara PT Vindia Agroindustri dengan petani, komoditi : pengolahan lobak dan ubi Jepang, untuk kebutuhan ekspor ke Jepang dan Korea
	Sumber: Erfit. 2011
4. Malang Jawa Timur	Tahun 1996 di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, <i>Contract Farming</i> bersifat formal antara Pabrik Gula Kebon Agung dengan petani Tebu, Komoditi : pengolahan tebu, untuk kebutuhan pabrik gula
	Sumber: Pangestuti dan Dessatria. 2013.
5. Sumatera Barat	Tahun 1980 di Pasaman Barat, <i>Contract Farming</i> bersifat formal antara PIR Kelapa Sawit Pasaman Barat dengan BUMN PTP VI, Komoditi : kelapa sawit, untuk kebutuhan pabrik pengolahan sawit
	Tahun 1980 di Lubuk Alung, <i>Contract Farming</i> bersifat formal antara Cabang PT Sang Hyang Sri dengan petani padi, Komoditi : penangkaran benih padi, untuk kebutuhan pabrik pengolahan sawit
	Akhir Tahun 1970, <i>Contract Farming</i> bersifat formal berupa Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Barat (P3RSB) dengan Dinas Perkebunan, komoditi : karet, untuk kebutuhan pabrik pengolahan karet
	Sumber: Martius, 2008

- Tipe sub kontrak, yaitu hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- Tipe dagang umum, yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- Pola kemitraan keagenan, dimana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa perusahaan mitra. Keunggulan pola ini adalah berupa keuntungan dari

penjualan ditambah komisi yang diberikan oleh perusahaan mitra.

- Pola kerjasama operasional, yaitu kelompok mitra menyediakan modal dan atau sarana untuk mengusahakan/budidaya.

PEMBAHASAN

a. Perspektif Rumah Tangga Petani : Pentingnya *Contract Farming* bagi Kesejahteraan Petani

Petani adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Tahap awal yang perlu ditempuh untuk memberdayakan petani adalah membentuk kelembagaan berupa kelompok tani yang merupakan organisasi kerja sama. Kerjasama sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi yang pada dasarnya sangat sulit bila dihadapi secara individu. Keterkaitan dan kerja sama kelembagaan kelompok tani dengan pihak swasta/usahawan dapat terjalin secara baik bila terdapat saling ketergantungan dan kerjasama yang bersifat simetri serta saling menguntungkan.

Beberapa alasan ditemukan dalam penelitian di China terkait tidak ikutnya petani dalam *Contract Farming*, yaitu dari 1036 petani, yang tidak ikut sejumlah 816 petani: lebih dari 50% petani tidak memiliki kesempatan untuk ikut, 20% petani tidak mengetahui manfaat secara jelas, 24% karena skala usaha yang kecil dan 2% karena proses yang terlalu rumit, sedangkan alasan yang memotivasi 220 petani mengikuti *Contract Farming* adalah akses pasar (56%), stabilitas harga (33%), dukungan kredit (7%) dan dukungan teknologi (3%) (Guo dan Jolly, 2009).

Sedangkan penelitian di Negara berkembang menjelaskan bahwa bagi petani kecil, memasuki atau ikut dalam sistem kontrak sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya transaksi, membuka akses pada pasar baru, meminjam modal, memperbaiki manajemen resiko, memperoleh informasi dan dan meningkatkan kesempatan kerja.

Berikut ini beberapa aspek yang menjadi dasar perspektif petani terhadap keikutsertaan dalam *Contract Farming*, yaitu benefit yang dirasakan petani, bagaimana bentuk *Contract Farming*, apakah meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani, kepastian permodalan

usahatani, kepastian pasar produk, kebebasan memilih komoditi, bargaining power / posisi tawar petani, transfer teknologi, dan manajemen resiko (Eaton, 2001).

b. Perspektif Perusahaan Agribisnis: *Contract Farming* yang berlanjut.

Secara umum, perusahaan agribisnis (firm) lebih senang menggunakan pendekatan kontrak, yaitu bekerjasama sama dengan petani sebagai pemasok bahan baku, daripada menanam langsung di lahan. Dibandingkan apabila pihak perusahaan memperoleh komoditas dari pasar terbuka dan sumber lain, biaya transaksi yang dikeluarkan menjadi lebih murah. Keberlanjutan kontrak menjadi hal penting sebab kepastian pasokan bahan atau produk serta transaction cost yang efisien merupakan keuntungan bagi perusahaan.

Faktor seleksi petani merupakan hal penting dalam keberhasilan pertanian kontrak. Beberapa indikator yang harus dipertimbangkan adalah pengalaman bertani, luas lahan yang dikuasai, kesuburan lahan (*fertility of farms*), dan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan komunitas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan agribisnis terlibat dalam *contract farming* berdasarkan beberapa penelitian adalah:

- Tipe perusahaan
- Karakteristik produk
- Syarat kualitas produk
- Pasar luar negeri
- Fluktuasi harga

Kegagalan kontrak biasanya disebabkan lemahnya tekanan formal ketika terjadi sesuatu di luar harapan. Petani kecil di negara berkembang umumnya tidak ingin lahannya dijadikan sebagai jaminan untuk kredit dan untuk jaminan berbagai kegagalan dalam pelaksanaan usaha agribisnis. Karena itulah, intinya adalah bagaimana memperkecil resiko kegagalan. Dari sisi pengusaha, bagaimana caranya agar petani tetap percaya dan mampu melanjutkan kontrak. Diharapkan petani kecil dapat melihat ini dan tetap mempercayai pihak pengusaha. Untuk itu, kontrak harus disusun dengan menjanjikan keuntungan yang cukup atraktif bagi petani. Bagi petani, sebagaimana pengalaman di Indonesia, mereka lebih memperhatikan aturan-aturan (*the rule*) yang disepakati daripada memperhatikan berbagai peluang untuk bertindak lain (*the exception*).

Tabel 2. Matrik Hasil Penelitian Terkait Contract Farming dan Perusahaan Agribisnis

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metodologi	Hasil
Implikasi Kontrak Usahatani dengan Perusahaan Terhadap Keberlanjutan Usahatani WACANA Vol. 13 No. 3 Juli 2010 ISSN. 1411-0199	Manzilati, Yustika, Krisnamurthi dan Suman	Survey di daerah Blitar (wilayah kontrak PT Pioneer dengan petani jagung) Menggunakan perspektif interaksi simbolik	Berulanginya kontrak usaha tani antara petani dengan perusahaan (besar) membawa implikasi (1) ekonomi: meningkatnya pendapatan petani, keberlangsungan usaha tani karena adanya benih gratis dan standby loan dari perusahaan, dan peningkatan produktivitas karena ketatnya aturan penanaman jagung pembenihan, (2) ekologi: kekurangtaatan kepada ketentuan alam terkait dengan formula 2:1 dan penggunaan pupuk yang membahayakan lingkungan, dan (3) kelembagaan (perubahan pemaknaan terhadap nilai hidup, transformasi aturan formal menjadi aturan informal yang diakibatkan oleh aturan isolasi, bergesemnya nilai sawah sebagai wilayah sosial menjadi area bisnis, dan bergesemnya peran lembaga formal desa (pamong). Implikasi ekonomi, ekologi, dan kelembagaan tersebut pada gilirannya berimplikasi kepada keberlanjutan usaha tani.
<i>Contract Farming in China : Perspective of Smallholders</i> Contributed Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, Beijing, Beijing, China, August 16-22, 2009	Guo,H dan Jolly,R	Survei	Survei menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang terlibat dalam kontrak pertanian relatif rendah dan proporsi rumah tangga bersedia untuk ikut kontrak. stabilitas harga dan akses pasar sebagai kunci motivasi rumah tangga untuk berpartisipasi dalam kontrak pertanian. Tengkulak dan perusahaan agribisnis adalah organisasi yang paling utama dalam kontrak, selain itu terdapat juga koperasi petani. Kontrak lebih banyak pada pemasaran daripada kontrak produksi, kontrak lisan menjadi yang paling banyak digunakan oleh tengkulak karena modal sosial yang kuat dan jaringan di daerah pedesaan. Ketentuan harga dasar disukai oleh sebagian besar rumah tangga karena resiko yang lebih rendah dan pembayaran cash on delivery adalah metode pembayaran yang disukai. Di Cina, peran paling penting dari contact farming untuk petani kecil adalah untuk menstabilkan harga jual.
Three Essays on Contract farming in China A dissertation Doctor of Phylosophy, Major; economics. Iowa State University, Ames. Iowa. 2007	Jianhua Zhu	Survey, propensity score matching dan econometric untuk mengestimasi effect program contract farming	Tujuan mendasar dari program pertanian kontrak China adalah untuk mendistribusikan manfaat lebih untuk petani kecil. Dari hasil model konseptual dan pengujian hipotesis empiris untuk China, dapat disarankan kebijakan berbasis bukti mengenai pengecualian pertanian kecil dari program kontrak. Rekomendasi utama adalah bahwa Pemerintah harus mempromosikan terjadinya hasil terbaik kedua, lebih menerapkan kebijakan praktis. Kontrak standar dengan dua jenis harga penawaran harus menjadi persyaratan untuk menerima kredit pajak pemerintah dan dukungan keuangan.
<i>Contract Farming and Other Market Institutions as Mechanisms for Integrating Smallholder Livestock Producers in the Growth and Development of the Livestock Sector in Developing Countries. A Living from Livestock. Pro-Poor Livestock Policy Initiative.</i>	Catello dan Costales	Survey	Aplikasi contract farming di peternakan didominasi kontrak formal. Analisis rantai pasokan pertanian bernilai tinggi dalam peran mereka merespon perubahan struktural akibat globalisasi pertanian dan munculnya supermarket, dan perhatian pada produsen dalam perdagangan domestik dan internasional bernilai tinggi dan keamanan pangan. Contract farming efektif dalam mengintegrasikan peternak kecil di pasar utama di negara-negara berkembang, Kontrak formal antara integrator besar dan petani kontrak cenderung memilih produsen menengah dan skala besar. Dalam kondisi-kondisi tertentu, di mana skala produksi yang dominan adalah kecil, integrator

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metodologi	Hasil
			harus bersaing dengan terlibat dalam kontrak dengan petani mengelola modal fisik dan sdm, yaitu, kemampuan mereka untuk memberikan output yang diperlukan.
Income Risk Perception and Management by Rural Farm Households, Taking Part in Sugarcane Contract Farming in Lao	Phoumanivong, <i>et al.</i> ,	Pendekatan kualitatif, menggunakan purposive Sampel	Persepsi risiko pendapatan dan pengelolaan kontrak pertanian tebu di tingkat rumah tangga petani di Laos, menunjukkan sumber risiko pendapatan rumah tangga yang terlibat dalam kontrak pertanian tebu, adalah tingginya biaya pembukaan lahan; di tanah tertentu, tingginya biaya tangkai tebu, biaya pupuk dan juga biaya tenaga kerja disebabkan oleh inflasi tahunan. Rumah tangga yang sadar akan risiko pendapatan dari kontrak pertanian tebu menggunakan strategi mereka sendiri untuk mengelolanya mencakup mengurangi jumlah input, menggunakan tenaga kerja mereka sendiri, menyewakan tanah mereka untuk orang lain dan diversifikasi tanaman lain dan temak.
Journal of Sustainable Development 8.8 (Oct 2015): 18-27.			
Is Contract Farming a risk management instrument for Chinese farmers?	Wang, H <i>et al.</i> ,	survei pada rumah tangga petani, di provinsi Shandong pada tahun 2010, dan analisis ekonometrik dengan logit dan regresi kuadratik	Faktor-faktor penentu contract farming terkait dengan sikap petani risiko, jenis kelamin, hasil, luas lahan dan ketersediaan tenaga kerja. Namun, petani menolak bahwa contract farming adalah alat manajemen risiko. Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dengan tenaga kerja yang lebih cenderung tidak menggunakan kontrak, tapi peternakan besar dengan areal lebih cenderung untuk ikut kontrak. Ini menunjukkan motivasi utama petani Cina bukan kepada manajemen risiko harga pasar, melainkan mencari penawaran yang lebih baik dan pengurangan biaya transaksi.
China Agricultural Economic Review 3.4 (2011): 489-505			
Small-scale Maize farmers' Decision to Participate in Contract Farming: Implications for integration into the marketing chain.	Anim, FDK	Survey, pengolahan data menggunakan model ekonometrik fungsi utilitas	Hasil menunjukkan bahwa bagi petani : akses ke informasi, pelatihan, sistem pertanian, ekstensi kunjungan, keanggotaan dalam organisasi petani, dan pendapatan rumah tangga, signifikan terhadap partisipasi petani dalam pertanian kontrak. Implikasi kebijakan mendidik petani yang menerima transfer uang tentang manfaat tambahan dalam pertanian kontrak untuk mengintegrasikan mereka ke dalam rantai pemasaran. Studi ini menyarankan kebijakan pelatihan dan dilengkapi penyuluh untuk penyebaran teknologi yang memiliki potensi untuk mengurangi kerugian panen, membantu petani untuk mendapatkan pendapatan cukup untuk memperluas daerah operasi mereka dan menarik perusahaan yang menawarkan pertanian kontrak.
African Journal of Business Management 5.13 (Jul 4, 2011): 5065-5069.			
Does Contract Farming Improve Productivity and Income of Farmer? A Review of Theory And Evidence.	Nguyen <i>et al.</i> ,	Ulasan literature dan data sekunder, metode kualitatif dan kuantitatif dengan fungsi produksi Cobb Douglas, fungsi produksi frontier	Secara umum semua studi menyatakan bahwa produktivitas petani dapat ditingkatkan dengan menggunakan kontrak pertanian, dengan tingkat Produktifitas yang berbeda-beda pada Negara maju dan Negara berkembang.
The Journal of Developing Areas 49.6 (2015): 531-538			
Farmers Perception on Contract Farming of Sugarcane in Orissa: A Village Level Study	Rout, <i>et al.</i> ,	Teknik multi-stage stratified random sampling,	Pertanian kontrak telah membantu para petani tebu marginal dan kecil untuk meningkatkan tingkat pendapatan mereka. Pemerintah harus mempromosikan pertanian kontrak tebu di daerah layak. Kontrak harus dibuat di bawah pengawasan tinggi dan transparansi

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metodologi	Hasil
Economic Affairs 58.4 (Dec 2013): 367-371			dengan Pemerintah yang bersangkutan, untuk menghindari eksploitasi petani oleh perusahaan kontraktor. Ketentuan kontrak harus ditentukan jelas di awal dengan surat persetujuan baik dari petani dan perusahaan. Pemerintah harus membentuk mekanisme monitoring dan badan penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi ketentuan kontrak.
Characteristics and Determinants of Contract Design of Wheat Seed Farming in India: A Basis of Decision Making.	Shiv, Kumar <i>et al.</i> ,	Analisis diskriminant	Rasio harga kontrak dan harga pasar terbuka menjadi atribut yang paling memikat untuk mendorong petani mengikuti kontrak diserat oleh teknologi, sertifikasi tepat waktu panen benih dengan dukungan dari perusahaan benih yang mensponsori, dukungan finansial yang memadai, kuantitas fisik produksi, dan cara pembayaran yang diperoleh menjadi prioritas dalam urutan dan menjadi atribut mendesak berikutnya dalam membedakan desain kontrak sektor publik dan swasta. Hal ini menciptakan kesenjangan antara profil kontrak sektor publik dan swasta. Karakteristik dalam desain kontrak sektor swasta yang lebih fleksibel untuk kebutuhan dan persyaratan bagi petani daripada desain kontrak sektor public.
Indian Journal of Agricultural Economics 65.4 (Oct-Dec 2010): 621-638			
Farm-Level Impacts of Vertical Coordination of the Food Supply Chain: Evidence from Contract Farming of Milk in India	Bhirtal, P <i>et al.</i> ,	Data primer hasil survey, estimasi dan membandingkan keuntungan pada contract farming dan produsen susu independent	Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting untuk memperkuat koordinasi vertikal. Pertama, rintangan utama dalam penyebaran lembaga tersebut adalah pembatasan hukum atas transaksi langsung antara produsen dan prosesor. Kedua, produsen skala kecil menghadapi biaya transaksi yang lebih tinggi, dan mereka mendapatkan keuntungan lebih dari lembaga yang mengurangi biaya pemasaran dan transaksi. Ketiga, pemerintah harus membuat tingkatan untuk pertumbuhan lembaga pemasaran yang tepat, mempromosikan kompetisi di antara berbagai pelaku pasar, dan mendorong petani untuk membentuk organisasi produsen untuk menangani perusahaan agribisnis. Keempat, scaling up koordinasi vertikal cenderung memiliki beberapa konsekuensi langsung dan tidak langsung untuk berbagai pemangku kepentingan dalam rantai pasokan serta bagi perekonomian secara keseluruhan. Efek dari scaling up dari pertanian kontrak akan melampaui produksi, sebagai efek multipler dalam hal pendapatan dan lapangan kerja akan signifikan di sektor sekunder dan tersier langsung atau tidak langsung terkait dengan rantai pasokan
Indian Journal of Agricultural Economics 64.3 (Jul-Sep 2009): 481-496.			

c. Implikasi Kebijakan : Bentuk Kemitraan Contract Farming dengan konsolidasi vertikal sebagai bentuk ideal bagi petani dan perusahaan agribisnis

Peran pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program diharapkan dapat mendorong dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menggairahkan petani/kelompok tani maupun pihak swasta/usahawan, sehingga agribisnis dapat berkembang. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator, regulator, motivator yang harus mensesuaikan hubungan

antar pelaku agribisnis tersebut, sehingga para pelaku dapat berinteraksi secara proporsional dan tidak terjadi eksploitasi yang bersifat kontradiktif. Para pelaku usaha bisa meraih keuntungan yang seimbang.

Pengintegrasian pertanian berkonotasi mewujudkan kemitraan (partnership) antara perusahaan pertanian dengan petani-petani kecil. Keduanya secara bersama, meskipun dengan peran masing-masing yang berbeda, dirancang untuk dapat mengendalikan keseluruhan rangkaian sistem agribisnis. Dari segi teoritis, kemitraan dianggap ideal dan akan cukup mampu memecahkan

masalah klasik yang dihadapi oleh pelaku ekonomi rakyat, yaitu dalam pemasaran, permodalan dan teknologi (Martius, 2008)

Integrasi secara vertikal diterangkan dalam teori ekonomi sebagai bentuk organisasi dimana satu perusahaan terdiri dari beberapa divisi, dengan sebagian divisi memproduksi bagian dan komponen yang digunakan divisi lain untuk menghasilkan produk jadi. Keunggulan terbesar dari integrasi vertikal ini adalah menghindari persoalan marginalisasi ganda yakni menghindari harga markup ganda (Pyndick dan Rubinfeld, 2013). Jadi perusahaan agribisnis akan memainkan perannya demikian juga petani dalam contract farming sebagai pengendali keseluruhan system agribisnis. Apabila divisi hulu dan hilir merupakan bagian dari pengorganisasian/kelembagaan yang sama, maka akan lebih mudah menjamin bahwa bagian dari komponen produk yang dihasilkan akan disalurkan tepat waktu dan dibuat sesuai spesifikasi yang diinginkan divisi hilir. Dengan demikian harapan petani dan harapan perusahaan agribisnis untuk menjalin kontrak yang berlanjut dapat dicapai.

KESIMPULAN

1. Petani melihat pentingnya kemitraan usaha dengan bentuk Contract Farming bagi kesejahteraan rumahtangga mereka dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu kepastian pasar, modal, penyerapan tenaga kerja, manajemen resiko, teknologi dan informasi.
2. Perusahaan Agribisnis memandang bahwa mengelola sekaligus membina kerjasama partnership dengan petani agar terjalin Contract Farming dengan memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
3. Bentuk kemitraan dengan konsolidasi vertikal sudah cukup ideal bagi petani dan perusahaan agribisnis untuk mengendalikan rangkaian system agribisnis yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anim, Francis D K.2011. Small-scale maize farmers' decision to participate in Contract Farming: Implications for integration into the marketing chain. *African Journal of Business Management* 5.13 (Jul 4, 2011): 5065-5069.
- Birthal, Pratap S; Jha, Awadhesh K; Tiongco, Marites M; Narrod, Clare. 2009. Farm-Level Impacts of Vertical Coordination of the Food Supply Chain: Evidence from Contract Farming of Milk in India . *Indian Journal of Agricultural Economics* 64.3 (Jul-Sep 2009): 481-496
- Catello, M.A.O., dan Achilles C. Castales, 2011. Contract Farming and Other Market Institutions as Mechanisms for Integrating Smallholder Livestock Producers in the Growth and Development of the Livestock Sector in Developing Countries. *A Living from Livestock. Pro-Poor Livestock Policy Initiative*. <http://www.Google.com>. di akses tanggal 6 Januari 2011.
- Daryanto, A., 2007. Contract Farming sebagai sumber pertumbuhan baru dalam bidang peternakan. From the desk of Arief Daryanto. WordPress.com weblog. <http://www.Google.com>. Diakses tanggal 4 Januari 2011.
- Erfit. 2011. Model Kemitraan Contract Farming pada Agribisnis Hortikultura. *Jurnal Embrio* Vol 4. [www.journal.unitas-pdg.ac.id/downloadfile.php?file=Jur...17\)%202011](http://www.journal.unitas-pdg.ac.id/downloadfile.php?file=Jur...17)%202011) diakses 18 Januari 2016.
- Eaton dan Shepherd .2001. Contract Farming: Partnership for Growth,FAO Agricultural Services Bulletin 145. <http://www.fao.org/docrep/014/y0937e/y0937e00.pdf> diakses 18 Januari 2016.
- Guo,H, Jolly RW & Zhu,J Contract Farming in China: Perspectives of Farm Households and Agribusiness Firms. *Comparative Economic Studies* 49, 285–312 (1 June 2007) doi:10.1057/palgrave.ces.8100202
- Guo,H, and Jolly,RW. Contract Farming in China: Perspectives of Smallholders. econpapers.repec.org/RePEc:pal:compes:v:49:y:2.

- Jabbar, M.A. Md Habibur Rahman, R.K.Talukder dan S.K. Raha, 2007. Formal and informal Contract Farming in poultry in Bangladesh. <http://www.Google.com>. di akses tanggal 16 Januari 2016.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.
- Kumar, Shiv; Chand, Puran; Dabas, J P S; Singh, Harvinder. 2010. Characteristics and Determinants of Contract Design of Wheat Seed Farming in India: A Basis of Decision Making. *Indian Journal of Agricultural Economics* 65.4 (Oct-Dec 2010): 621-638
- Key, N.; Runsten, D. 1999. Contract Farming, Smallholders and Rural Development in Latin America. The Organization of Agroprocessing Firms and the Scale of Outgrower Production. *World Development*, Volume 27, Number 2, 1 February 1999, pp.381-401(21)
- Martius,E. 2008. Kemitraan Agribisnis Untuk Memberdayakan Ekonomi Rakyat Jurnal Agribisnis Kerakyatan, Volume 1, Nomor 1, Juli 2008, hal. 1-11
- Nguyen et al.,2015. Does Contract Farming Improve Productivity and Income of Farmer? A Review of Theory And Evidence. *The Journal of Developing Areas* 49.6 (2015): 531-538.
- Patrick,I. 2004. Contract Farming in Indonesia: Smallholders and Agribusiness Working Together. Australian Centre for International Agricultural Research Canberra. ISBN 1 86320 410 5. http://www.ruralfinanceandinvestment.org/sites/default/files/1120037627274_contract_farming_Indonesia.pdf diakses 15 Januari 2016
- Phoumanivong et al. 2015 Income Risk Perception and Management by Rural Farm Households, Taking Part in Sugarcane Contract Farming in Lao PDR. *Journal of Sustainable Development* 8.8 (Oct 2015): 18-27.
- Pyndick dan Rubinfeld. 2013. Mikroekonomi Edisi ke delapan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rout, R K; Mishra, R K; Bar, Narayan; Mondal, Debabrata 2013. Farmers Perception on Contract Farming of Sugarcane in Orissa : A Village Level Study *Economic Affairs* 58.4 (Dec 2013): 367-371
- Simmons, Phil. 2002. Overview of Smallholder Contract Farming in Developing countries. ESA Working Paper No. 02-04. Graduate School of Agricultural and Resource Economics University of New England, Armidale, Australia, 2351. Agricultural and Development Economics Division The Food and Agriculture Organization of the United Nations. <http://www.fao.org/docrep/007/ae023e/ae023e00.htm> diakses 16 Januari 2016
- Wang,H et al., 2011. Is Contract Farming a Risk Management Instrument for Chinese Farmers? . *China Agricultural Economic Review* 3.4 (2011): 489-505.
- Zianhua Zhu, 2007. Three essays on Contract Farming in China Iowa State University Digital Repository @ Iowa State University